

# Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud

Andani Rizki Putri, Munari\*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia

Email: <sup>1</sup>21013010265@student.upnjatim.ac.id, <sup>2,\*</sup>munari.ak@upnjatim.ac.id

Email Penulis Korespondensi: munari.ak@upnjatim.ac.id

Submitted: 12/11/2025; Accepted: 30/01/2026; Published: 01/02/2026

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Munculnya fenomena penyimpangan dalam pengelolaan dana desa menunjukkan mekanisme pengawasan yang lemah dan kurangnya kesadaran etika di kalangan aparat desa dalam mematuhi norma-norma akuntabilitas publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei berpendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 84 aparat desa yang berasal dari 12 desa di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis regresi linier berganda SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai signifikansi 0,039. *Whistleblowing system* juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,001, demikian pula komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,001. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai F hitung 87,410 > F tabel 3,1108. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,757 menunjukkan bahwa pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi mampu menjelaskan 75,7% variasi pencegahan *fraud*. Temuan ini menekankan pentingnya memperkuat tata kelola desa dengan menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif, *whistleblowing system* yang aman dan andal, dan membangun budaya kerja yang berdasarkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral untuk mencapai pengelolaan dana desa yang transparan dan bebas *fraud*.

**Kata Kunci:** Dana Desa; Komitmen Organisasi; Pencegahan *Fraud*; Pengendalian Internal; *Whistleblowing System*

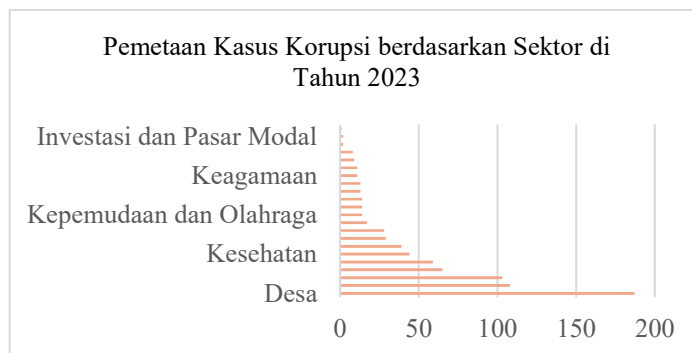
**Abstract**—This study aims to analyze the influence of internal control, whistleblowing system, and organizational commitment on fraud prevention in village fund management. The emergence of irregularities in village fund administration indicates weak oversight mechanisms and a lack of ethical awareness among village officials in adhering to public accountability standards. This research was conducted using a quantitative survey approach through the distribution of questionnaires to 84 village officials from 12 villages in Lamongan District, Lamongan Regency. The collected data were processed using multiple linear regression analysis with SPSS version 30. The results show that internal control has a positive and significant effect on fraud prevention with a significance value of 0.039. The whistleblowing system also has a positive and significant effect with a significance value of 0.001, and organizational commitment likewise shows a positive and significant effect with a significance value of 0.001. Simultaneously, the three variables significantly influence fraud prevention, as indicated by an F-value of 87.410, which is greater than the F-table value of 3.1108. The Adjusted R Square value of 0.757 indicates that internal control, whistleblowing system, and organizational commitment explain 75.7% of the variation in fraud prevention. These findings emphasize the importance of strengthening village governance by implementing effective internal control systems, providing secure and reliable whistleblowing mechanisms, and building an organizational culture grounded in honesty, integrity, and moral responsibility to achieve transparent and fraud-free village fund management.

**Keywords:** Village Fund; Organizational Commitment; Fraud Prevention; Internal Control; Whistleblowing System

## 1. PENDAHULUAN

Dana desa adalah mekanisme fiskal yang diciptakan pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa, Setiap desa menerima alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pengembangan masyarakat di tingkat desa. Strategi ini disusun sebagai program pembangunan nasional yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan mencapai kemandirian lokal (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dana desa membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong peningkatan kesejahteraan warga dan mutu layanan publik. Namun, pada kenyataannya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah masalah utama, terutama penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan di desa.

Pemerintah mengalokasikan dana desa melalui APBN dan didistribusikan melewati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini berfungsi agar menunjang penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan, pengembangan masyarakat, dan pertumbuhan desa. Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2023), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, bagian pemerintahan desa memiliki tingkat kasus korupsi paling tinggi di Indonesia, dengan 187 kasus dengan jumlah kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Penggelapan anggaran, pelaporan palsu, dan penyalahgunaan dana kegiatan merupakan jenis penyimpangan yang umum terjadi. Kondisi ini menggambarkan struktur pengawasan yang tidak memadai dan rendahnya integritas aparat desa, yang merupakan penyebab utama terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan negara.



**Gambar 1.** Pemetaan kasus korupsi

Di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Babat, terjadi kasus salah kelola keuangan publik. Kepala Desa Puncakwangi dan bendaharannya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan atas tuduhan penggelapan dana desa sebesar Rp147 juta dari tahun 2017 hingga 2019. Kejadian ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengendalian internal dan kurangnya tanggung jawab akuntansi dalam pengelolaan dana di desa. Sementara itu, di Kabupaten Lamongan alokasi dana desa terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp10,6 miliar pada tahun 2024 (Hamzah & AE, 2023). Peningkatan ini meningkatkan potensi pencurian, sehingga pemerintah desa harus memperketat pengendalian internal dan membangun komitmen organisasi yang kuat untuk memastikan tata kelola dana desa yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari *fraud*. *Fraud* dalam pengelolaan dana desa menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap tata kelola yang efektif. Menurut *Fraud Hexagon Theory* dari Vousinas (2019), *fraud* didorong oleh enam faktor utama: tekanan, kapasitas, kolusi, peluang, rasionalisasi, dan ego. Dalam kerangka administrasi desa, peluang dan ego merupakan dua variabel yang dapat dikontrol secara struktural. Oleh karena itu, upaya untuk menghindari *fraud* dana desa harus difokuskan pada peningkatan mekanisme pengendalian internal dan peningkatan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pegawai pemerintah menunjukkan pentingnya berbagai pihak untuk bertindak dan menghindari penyelewengan di dalam organisasi, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, agar terhindar dari kerugian negara di masa mendatang (Yolanda et al., 2025). Korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling umum di sektor publik, karena operasional penerimaan dan pengeluaran pemerintah diawasi oleh pejabat berwenang yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan melaksanakan program publik (Sari & Majid, 2021). Situasi ini membutuhkan tindakan pencegahan yang sistematis, tidak hanya melalui penegakan aturan dan regulasi, tetapi juga melalui pelaksanaan praktis dan peningkatan kesadaran individu dalam organisasi desa. Meningkatkan pengetahuan aparatur desa tentang dampak dan dampak *fraud*, melibatkan mereka secara aktif dalam sistem pemantauan, dan menerapkan prinsip keterbukaan dan tertib administrasi merupakan komponen penting untuk mencapai pemerintahan desa yang bersih dan terpadu.

Penerapan sistem pengendalian internal yang efisien dan tepat guna memiliki peran penting dalam upaya pencegahan *fraud* karena membantu organisasi mencapai tujuannya secara efisien dan efektif (Eskandar, 2022). Pengendalian internal mencakup perencanaan dan metode untuk perlindungan aset, penyediaan informasi yang dapat dipercaya, peningkatan produktivitas, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mufidah & Masnun, 2021). Deza dan Utomo (2024) menemukan bahwa penerapan pengendalian internal berkontribusi secara signifikan terhadap upaya menghindari *fraud*. Sistem pengendalian internal, jika diterapkan dengan tepat, dapat secara efektif membatasi risiko *fraud*, khususnya dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa.

*Whistleblowing system* adalah mekanisme pengungkapan tindakan penyimpangan yang dilaksanakan oleh pekerja atau eksekutif dalam suatu instansi dapat mengakibatkan kerugian dan merusak reputasi perusahaan merugikan perusahaan (Rahmadani, Nugroho, & Martaseli, 2023). *Whistleblowing system* memudahkan mereka untuk mengungkap dugaan *fraud* atau aktivitas kriminal. Penerapan sistem ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal tidak langsung, yang mendorong aparatur pemerintah desa untuk lebih berhati-hati sebelum melakukan perilaku *fraud* (Putri & Kisnawati, 2024). Menurut Prabawati dan Rasmini (2024), pembentukan *whistleblowing system* meningkatkan pencegahan *fraud*. Namun, masih banyak orang yang enggan melaporkan pelanggaran karena takut akan hukuman. Salah satu hambatan paling signifikan terhadap implementasi sistem yang optimal adalah kurangnya perlindungan bagi *whistleblower*.

Komitmen organisasi sangat penting untuk menumbuhkan budaya kerja yang berdasarkan kejujuran dan integritas untuk mencegah *fraud*. *Fraud* dapat dikurangi dengan meningkatkan komitmen organisasi untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab secara berkala. Menurut (Sanjani & Werastuti, 2021), komitmen organisasi merupakan proses berkelanjutan di mana karyawan menunjukkan kepedulian terhadap institusinya. Sementara itu, Syaputri et al., (2025) menggambarkan komitmen organisasi sebagai komitmen seluruh anggota terhadap suatu organisasi, yang dibuktikan dengan keterlibatan aktif, rasa saling percaya, dan tujuan bersama, serta loyalitas dan dedikasi terhadap kepentingan bersama. Syaputri et al., (2025) menemukan bahwa dedikasi organisasi memiliki pengaruh positif dan substansial dalam pencegahan *fraud*. Akibatnya, pelaksanaan komitmen organisasi yang efisien dapat membatasi kemungkinan terjadinya *fraud*, termasuk dalam pengelolaan dana yang ada di desa (Nurhayati, 2022).

Beberapa studi sebelumnya telah menemukan bahwa pembentukan pengendalian internal, sistem whistleblower, dan komitmen organisasi memainkan peran penting dalam upaya mencegah terjadinya fraud pada pengelolaan dana desa, tetapi perubahan konteks sosial, budaya, dan tata kelola antarwilayah memerlukan penelitian yang lebih relevan dan kontekstual secara lokal. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh dan relasi antara penerapan pengendalian internal, whistleblowing system, serta tingkat komitmen organisasi dalam mencegah pencurian dana desa di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan. Temuan ini diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten, aparatur desa, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan langkah-langkah pencegahan *fraud*.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 *Fraud Hexagon Theory*

Menurut Vousinas (2019), *Fraud Hexagon Theory* merupakan pengembangan dari teori *fraud* George, yang diperluas sebagai respons terhadap berbagai kasus *fraud*, terutama yang melibatkan konspirasi atau kerja sama antar pelaku, karena dianggap memiliki potensi risiko kerugian tertinggi dibandingkan jenis *fraud* lainnya. Teori ini menggabungkan enam aspek penting yang dilambangkan dengan akronim The S.C.C.O.R.E yang terdiri dari enam elemen, yaitu *Stimulus*, *Capability*, *Collusion*, *Opportunity*, *Rationalization*, dan *Ego*.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, setiap aspek *Fraud Hexagon Theory* berkontribusi secara signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*. *Stimulus* merujuk pada tekanan sosial dan ekonomi yang bisa menjadi faktor penggerak bagi seseorang untuk melakukan tindakan tidak jujur demi kepentingan pribadi. Ketika sistem pengawasan internal dan eksternal gagal, pelaku *fraud* diberi *opportunity* untuk menyalahgunakan wewenangnya. *Rationalization* bertindak sebagai pembenaran moral, membuat pelaku merasa dibenarkan atas perilakunya. Sementara itu, *capability* merepresentasikan posisi, keterampilan, dan kemampuan seseorang untuk memungkinkan terjadinya *fraud*. *Ego* menunjukkan persepsi kekebalan dari hukuman, sedangkan *collusion* merepresentasikan kolaborasi dua orang atau lebih dalam melakukan kejahatan *fraud* (Fikiza & Halimatusyadiah, 2025).

#### 2.1.2 Pencegahan *Fraud*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2020), membangun sistem pengendalian yang andal merupakan tahap krusial dalam langkah-langkah pencegahan *fraud*. Pengendalian yang efektif mengurangi kemungkinan terjadinya aktivitas *fraud* dengan membatasi peluang, mengurangi tekanan pada individu untuk mencapai tuntutan tertentu, dan menolak penjelasan atas alasan *fraud* (Dewi et al., 2022). Menurut Mufidah dan Masnun (2021), *fraud* merupakan jenis kejahatan yang dapat ditangani dengan dua pendekatan utama: pencegahan dan deteksi. Pencegahan *fraud* mencakup serangkaian kegiatan proaktif itu dapat dilakukan oleh siapa saja dalam organisasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, menjaga integritas, dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan sukses. bertanggung jawab (Wulandari, 2021).

Pencegahan *fraud* pendekatan proaktif yang mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dengan menghilangkan celah hukum, mengurangi tekanan, dan menolak alasan untuk melakukan *fraud*. Pencegahan *fraud* tidak hanya ditunjukkan melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui perilaku, kesadaran, dan dedikasi seluruh perangkat desa untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel ini dinilai berdasarkan indikator penerapan kebijakan anti fraud, prosedur pencegahan, teknik pengendalian, dan kepekaan terhadap *fraud* Fitriana (2024). Implementasi kebijakan anti-*fraud* menunjukkan adanya pedoman dan aturan untuk mencegah penyimpangan; prosedur pencegahan mengatur mekanisme operasional untuk menutup peluang terjadinya *fraud*; teknik pengendalian menggambarkan pengendalian teknis atas pengelolaan dana desa; dan kepekaan terhadap *fraud* menunjukkan kemampuan perangkat desa untuk mendeteksi indikasi penyimpangan sejak dini.

#### 2.1.3 Dana Desa

Pemerintah melalui APBN mengalokasikan dana bagi desa yang penyalurannya dilakukan melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat. serta kegiatan pembangunan lainnya di tingkat desa, dan disalurkan dialokasikan secara adil kepada seluruh desa dan desa adat melalui tahapan penganggaran dalam APBD kabupaten atau kota (Khoerunnisa et al., 2023). Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Pengelolaan dana di desa wajib dilaksanakan secara tertib dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, dengan berlandaskan efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparan, dan akuntabilitas, berdasarkan asas keadilan, kepatuhan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sari & Majid, 2021).

#### 2.1.4 Pengendalian Internal

Pengendalian internal dalam suatu organisasi atau perusahaan terutama ditujukan untuk melindungi aset dari berbagai jenis penyalahgunaan dan pelanggaran (Rahmadani et al., 2023). Sistem ini menjamin keamanan aset, kebenaran dan keandalan informasi akuntansi, serta memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan regulasi yang berjalan. Pengendalian

internal harus diterapkan secara menyeluruh oleh manajemen dan seluruh staf agar bisnis dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, termasuk penyusunan laporan keuangan yang andal dan kepatuhan hukum (Dewi & Sari, 2022). Lebih lanjut, pembentukan pengendalian internal sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pencapaian tujuan dan mengurangi risiko atau kerugian yang tidak terduga (Indriasih, Fajri, & Febriana, 2022).

Pengendalian internal dalam pemerintahan desa didefinisikan sebagai serangkaian proses dan aturan yang bertujuan untuk melindungi aset organisasi, memastikan keandalan informasi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa pejabat desa mematuhi peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan, meredakan ketegangan, dan menolak alasan-alasan yang melatarbelakangi perilaku kecurangan. Melalui pemantauan berlapis dan proses kerja yang jelas, pemerintahan desa dapat mengungkap inkonsistensi sejak dini dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Variabel pengendalian internal diukur secara operasional menggunakan indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan Intan (2021). Lingkungan pengendalian mencerminkan komitmen organisasi terhadap integritas dan tata kelola yang baik; penilaian risiko mencerminkan kemampuan desa untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan; prosedur pengendalian mencerminkan mekanisme pencegahan dan deteksi; dan pemantauan adalah evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian.

### 2.1.5 Whistleblowing System

*Whistleblowing system* adalah mekanisme pelaporan pelanggaran, perbuatan melanggar hukum, atau perbuatan melanggar etika yang dilakukan personel organisasi, baik yang masih aktif menjabat ataupun yang telah tidak aktif, terhadap pihak internal lembaga dan eksternal (Dewi et al., 2022). Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi dan merespons potensi *fraud* secara lebih cepat dan terbuka (Sanjani & Werastuti, 2021). *Whistleblowing System* memungkinkan pelapor (*whistleblower*) untuk lebih mudah mengomunikasikan informasi tentang pelanggaran yang telah terjadi. Lebih lanjut, penggunaan sistem ini membantu menciptakan efek jera, di mana pemerintah desa menjadi bertindak dengan hati-hati dan menimbang konsekuensi sebelum melakukan *fraud* (Putri & Kisnawati, 2024).

*Whistleblowing system* membantu mendeteksi potensi penipuan dengan lebih cepat dan terbuka, sekaligus menyediakan lingkungan yang aman bagi *whistleblower* untuk mengungkapkan setiap penyimpangan. *Whistleblowing system* juga berperan sebagai disinsentif, yang meningkatkan kehati-hatian pelaksana dana desa. *Whistleblowing system* dievaluasi secara operasional menggunakan tiga indikator, yaitu aspek struktural, aspek operasional, dan aspek pemeliharaan Cahyani (2023). Aspek struktural mencakup ketersediaan saluran pelaporan; aspek operasional mengacu pada proses penerimaan dan tindak lanjut laporan; dan aspek pemeliharaan mencakup upaya untuk menjaga agar sistem tetap beroperasi.

### 2.1.6 Komitmen Organisasi

Suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan di mana individu peduli terhadap organisasinya dan mengadopsi nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta tujuannya adalah pengertian dari komitmen organisasi (Sanjani & Werastuti, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, komitmen organisasi digambarkan sebagai rasa tanggung jawab dan dedikasi penuh para pejabat desa dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama. Mereka yang memiliki tingkat komitmen tinggi akan selalu menghormati dan menegakkan kejujuran, loyalitas, serta tanggung jawab terhadap organisasi mengutamakan tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi (Kasmini & Dewi, 2021). Senada dengan itu, Indriasih et al., (2022) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sikap yang meningkatkan keterikatan emosional dan moral individu terhadap organisasinya, sehingga mendorong mereka untuk bekerja secara optimal guna mencapai tujuan organisasi.

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai proses psikologis di mana individu mengekspresikan kepedulian, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap tujuan, keyakinan, dan cita-cita organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, komitmen organisasi tercermin dalam tekad para pejabat desa untuk beroperasi secara efisien, menjaga integritas, mematuhi aturan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Individu dengan komitmen yang kuat akan menunjukkan loyalitas, pengabdian, dan kesiapan untuk mempertahankan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Variabel komitmen organisasi diukur dengan tiga indikator, yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif Rahmayanti (2020). Komitmen afektif mengekspresikan hubungan emosional dengan organisasi, komitmen berkelanjutan mengacu pada alasan yang masuk akal untuk terus bekerja, dan komitmen normatif menunjukkan kebutuhan moral untuk memenuhi tugas seseorang.

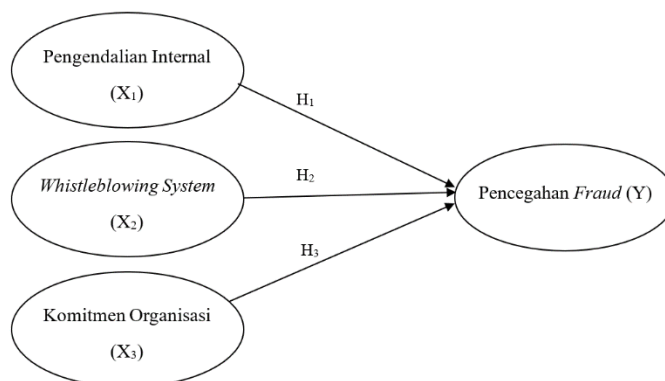
## 2.2 Kerangka Dasar Penelitian

Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini melalui metode survei dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada aparatur desa yang berada di Kabupaten Lamongan. Data primer dikumpulkan dari 84 responden dari 12 permukiman di wilayah tersebut. Pengambilan sampel secara purposif digunakan untuk memilih responden berdasarkan kriteria tertentu, termasuk perangkat desa yang menduduki posisi strategis seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Kesejahteraan. Keputusan ini diambil dengan pemahaman bahwa otoritas-otoritas ini memiliki peran langsung dalam proses pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, sehingga relevan untuk menilai variabel-variabel yang diteliti.

Instrumen penelitian ini dikembangkan menggunakan skala *semantic differential* dengan rentang nilai 1 hingga 5 untuk menilai kesan responden terhadap empat variabel utama: pengendalian internal, *whistleblowing system*, komitmen organisasi, dan pencegahan *fraud*. Data penelitian kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan dukungan perangkat lunak statistik SPSS versi 30. Sebelum pelaksanaan penelitian, sejumlah uji dilakukan, meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Proses pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ), disertai dengan uji F dan uji t dalam rangka mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun individual.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Keterkaitan antara variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Gambar 2, sebagai berikut:



**Gambar 2.** Kerangka Konseptual

#### 2.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengendalian internal adalah kumpulan teknik dan proses yang dimanfaatkan organisasi untuk melindungi aset, menyajikan data yang valid dan andal, mengoptimalkan efisiensi kegiatan operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap standar manajemen (Mufidah & Masnun, 2021). Menurut *Fraud Hexagon Theory*, faktor peluang merupakan salah satu aspek kunci penyebab *fraud*. Peluang ini seringkali muncul akibat sistem pengendalian internal yang buruk, kurangnya pengawasan, dan distribusi pekerjaan yang tidak merata. Yolanda et al., (2025) menemukan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap upaya pencegahan *fraud*, yang berarti bahwa semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian internal, semakin kecil kemungkinan terjadinya *fraud*. Dengan demikian, pengendalian internal berperan penting dalam mengurangi celah bagi individu yang tidak berintegritas untuk melakukan *fraud* dalam suatu bisnis. Dari uraian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_1$  = Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

#### 2.3.2 Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan *Fraud*

*Whistleblowing System* adalah mekanisme pelaporan *fraud* yang dirancang sebagai upaya untuk mencegah munculnya tindakan *fraud* dalam organisasi sekaligus mempertahankan kelangsungan operasional jangka panjangnya (Sanjani & Werastuti, 2021). Dalam kerangka *Fraud Hexagon Theory*, pendekatan ini penting untuk memutus siklus kolaborasi dan rasionalisasi, dua aspek yang seringkali memicu *fraud*. Kolusi merupakan tantangan besar karena membutuhkan kolaborasi dari dua orang atau lebih, sehingga *fraud* semakin sulit dideteksi. Wawo (2022) menemukan bahwa penerapan *whistleblowing system* meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendeteksi *fraud*. Akibatnya, semakin efektif dan transparan struktur sistem *whistleblower*, semakin tinggi peluang organisasi untuk mendeteksi dan mencegah *fraud* sejak dini. Dari uraian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_2$  = *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

#### 2.3.3 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud*

Komitmen organisasi adalah sikap dan keterikatan individu terhadap tujuan, visi, dan maksud organisasi tempat mereka bekerja, yang memotivasi mereka untuk bertahan dan berjuang mencapai tujuan bersama (Indriasih et al., 2022). Menurut *Fraud Hexagon Theory*, komitmen organisasi sangat terkait dengan variabel kesombongan (ego) dan tekanan. Individu dengan tingkat komitmen yang tinggi cenderung mengutamakan tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi, yang memungkinkan mereka menghindari aktivitas *fraud* bahkan ketika berada di bawah tekanan sosial dan ekonomi. Temuan studi Sanjaya (2022) mendukung temuan ini, yang mengindikasikan bahwasanya komitmen organisasi berkontribusi secara positif dan signifikan dalam pencegahan praktik *fraud*. Dengan demikian, semakin tinggi dedikasi aparatur terhadap perusahaan, semakin kecil potensi munculnya tindakan *fraud* dalam lingkungan kerja. Dari uraian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_3$  = Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Analisis

##### 3.1.1 Hasil Uji Validitas

**Tabel 1.** Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung
Pengendalian Internal	X1.1	0,726
	X1.2	0,793
	X1.3	0,581
	X1.4	0,796
	X1.5	0,457
	X1.6	0,708
	X1.7	0,741
	X1.8	0,786
	X1.9	0,677
	X1.10	0,660
<i>Whistleblowing System</i>	X2.1	0,564
	X2.2	0,657
	X2.3	0,700
	X2.4	0,685
	X2.5	0,871
	X2.6	0,807
	X2.7	0,900
	X2.8	0,765
	X2.9	0,816
	X2.10	0,871
Komitmen Organisasi	X3.1	0,666
	X3.2	0,733
	X3.3	0,589
	X3.4	0,689
	X3.5	0,701
	X3.6	0,686
Pencegahan <i>Fraud</i>	Y.1	0,668
	Y.2	0,762
	Y.3	0,727
	Y.4	0,668
	Y.5	0,506
	Y.6	0,748
	Y.7	0,587
	Y.8	0,718

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai r estimasi untuk setiap item pernyataan Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Komitmen Organisasi, dan Pencegahan *Fraud* melebihi r tabel (0,215). Berdasarkan analisis yang dilakukan, seluruh indikator pada keempat variabel memiliki tingkat validitas yang tinggi dan bisa untuk digunakan dalam proses pengumpulan data.

##### 3.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 2.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha
Pengendalian Internal	0,887
<i>Whistleblowing System</i>	0,919
Komitmen Organisasi	0,760
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,808

Tabel 2 mengindikasikan hasil pengujian reliabilitas menampilkan bahwa setiap variabel dalam penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, yang mengindikasikan konsistensi internal yang sangat baik. Nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel adalah Pengendalian Internal adalah 0,887, *Whistleblowing System* 0,919, Komitmen Organisasi 0,760, dan Pencegahan *Fraud* 0,808. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel dinyatakan

reliabel, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian menunjukkan keandalan serta konsistensi yang baik dalam menilai setiap variabel.

### 3.1.3 Hasil Uji Normalitas

**Tabel 3.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		84
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,86457007
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,043
	Negative	-,059
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>d</sup>

Berdasarkan data pada Tabel 3, hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Hasilnya, data yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan pola distribusi yang teratur, yang memenuhi salah satu persyaratan utama untuk analisis regresi linier berganda.

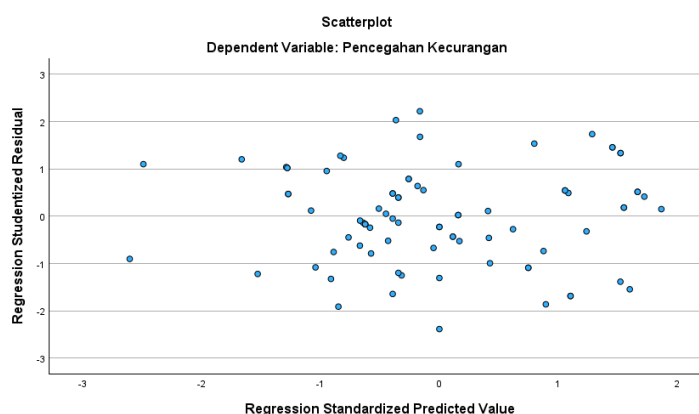
### 3.1.4 Hasil Uji Multikorelasi

**Tabel 4.** Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerancrce
Pengendalian Internal	3,627	0,276
<i>Whistleblowing System</i>	3,457	0,289
Komitmen Organisasi	2,144	0,467

Tabel 4 hasil pengujian menunjukkan bahwasanya seluruh variabel mempunyai nilai toleransi > 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10, yang menandakan menandakan bahwa antar variabel independen dalam model regresi tidak terdapat adanya masalah multikolinearitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan terbukti bebas dari multikolinearitas, sehingga data yang diperoleh dinilai layak untuk dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya tanpa kendala.

### 3.1.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 3.** Grafik Scatterplot

**Tabel 5.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
Constant	0,403
Pengendalian Internal	0,677
<i>Whistleblowing System</i>	0,546
Komitmen Organisasi	9,915

Berdasarkan Gambar 3 (Grafik Scatterplot), titik-titik data tampak terdistribusi secara acak di sekitar sumbu horizontal, baik di atas maupun di bawahnya, tanpa pola yang jelas. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa varians residual menunjukkan karakteristik yang tidak teratur dan tidak mengikuti pola tertentu. lanjut, hasil pada Tabel 5

pengujian menunjukkan nilai signifikan  $> 0,05$ , yang berarti model regresi tidak mengandung indikasi heteroskedastisitas, yang berarti model ini sesuai dengan kondisi klasik dan tepat untuk digunakan dalam analisis regresi.

### 3.1.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 6.** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig
(Constant)	0,748	0,378	0,707
Pengendalian Internal	0,161	2,104	0,039
<i>Whistleblowing System</i>	0,353	4,216	0,001
Komitmen Organisasi	0,388	4,042	0,001

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikan 0,039 ( $< 0,05$ ) untuk variabel Pengendalian Internal ( $X_1$ ), yang menunjukkan pengaruh substansial terhadap pencegahan *fraud*. Variabel *Whistleblowing System* ( $X_2$ ) dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 yang lebih rendah dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pencegahan kecurangan. Selanjutnya, variabel Komitmen Organisasi ( $X_3$ ) menunjukkan bahwa dengan nilai signifikan 0,001  $< 0,05$ , variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan cukup besar terhadap pencegahan kecurangan. pencegahan *fraud*. Secara keseluruhan, temuan penelitian mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini, Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Komitmen Organisasi masing-masing mempunyai pengaruh positif serta pada terhadap variabel dependen Pencegahan *Fraud* (Y), yang menyiratkan bahwa semakin baik ketiga faktor ini diterapkan, semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud*.

### 3.1.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,875 <sup>a</sup>	,766	,757	1,899

Merujuk pada data yang tercantum dalam Tabel 7, nilai R adalah 0,875, R Kuadrat adalah 0,766, dan R Kuadrat yang Disesuaikan adalah 0,757. Variabel independen Pengendalian Internal ( $X_1$ ), *Whistleblowing System* ( $X_2$ ), dan Komitmen Organisasi ( $X_3$ ) menyumbang 75,7% variasi dalam variabel dependen Pencegahan *Fraud* (Y). Hal tersebut menandakan bahwa ketiga variabel pada penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan dalam memengaruhi langkah-langkah pencegahan *fraud*. Sementara itu, 24,3% sisanya dijelaskan oleh karakteristik selain model penelitian ini, seperti fitur budaya organisasi, kepemimpinan, atau faktor lingkungan eksternal yang tidak diteliti pada penelitian ini.

### 3.1.8 Hasil Uji F

**Tabel 8.** Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	945,857	3	315,286	87,410	<,001 <sup>b</sup>
Residual	288,560	80	3,607		
Total	1234,417	83			

Data pada Tabel 8 menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,001  $< 0,05$ , yang menandakan bahwa tingkat signifikan lebih rendah dari batas yang ditetapkan, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menegaskan bahwasanya variabel Pengendalian Internal ( $X_1$ ), *Whistleblowing System* ( $X_2$ ), dan Komitmen Organisasi ( $X_3$ ) semuanya berpengaruh signifikan terhadap variabel Pencegahan *Fraud* (Y). Temuan ini mendukung hipotesis bahwa ketika ketiga kriteria ini digabungkan, ketiganya dapat memperkuat efektivitas paya menjaga transparansi dan akuntabilitas guna mencegah *fraud* pada dana desa.

### 3.1.8 Hasil Uji t

**Tabel 9.** Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	,748	1,982		,378	,707
Pengendalian Internal	,161	,077	,217	2,104	,039
<i>Whistleblowing System</i>	,353	,084	,424	4,216	<,001
Komitmen Organisasi	,388	,096	,320	4,042	<,001

Temuan pada Tabel 9 menampilkan bahwa variabel Pengendalian Internal ( $X_1$ ) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,039  $< 0,05$ , yang menandakan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Oleh karena itu, hipotesis pertama ( $H_1$ ) didukung. Variabel *Whistleblowing System* ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi 0,001  $< 0,05$ , yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Oleh sebab itu, hipotesis kedua ( $H_2$ ) didukung. Variabel Komitmen Organisasi ( $X_3$ ) berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap peningkatan Pencegahan *Fraud*,

yang mendukung hipotesis ketiga ( $H_3$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga faktor independen menunjukkan kontribusi yang berarti terhadap optimalisasi efektivitas pencegahan *fraud* dalam administrasi dana desa.

### 3.2 Pembahasan

#### 3.2.1 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dalam efektivitas pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lamongan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dapat menghasilkan mekanisme pengawasan yang lebih terorganisir, sehingga mengurangi kemungkinan anomali atau aktivitas *fraud*. Terdapat lima elemen utama pada sistem pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, langkah-langkah pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan monitoring merupakan elemen utama dari sistem pengendalian internal yang membantu otoritas desa mengembangkan rasa tanggung jawab dan tanggung jawab.

Temuan ini juga konsisten dengan *Fraud Hexagon Theory*, yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang buruk menciptakan kemungkinan bagi individu untuk melakukan *fraud*. Penelitian ini memvalidasi kesimpulan Syafitri dan Syafdinal (2023), yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh yang baik dan signifikan bagi pencegahan *fraud* karena pengawasan yang kuat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya anomali dalam perusahaan. Temuan serupa ditemukan oleh Deasri dan Utama (2022), yang menyebutkan bahwa semakin optimal pelaksanaan sistem pengendalian internal, semakin kecil risiko terjadinya tindakan *fraud* akuntansi. Lebih lanjut, efisiensi pengendalian internal tidak sepenuhnya bergantung pada strategi yang diterapkan, namun juga pada integritas, kompetensi, dan kepatuhan otoritas desa terhadap proses yang tepat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pelaksanaan pemantauan yang berkesinambungan diperlukan untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi optimal dalam mencegah berbagai jenis *fraud* di lingkungan pemerintahan desa.

#### 3.2.2 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan *whistleblowing system* berdampak positif dan signifikan terhadap pengurangan pencurian dana desa di pemerintahan desa di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menyiratkan bahwa penerapan *whistleblowing system* dapat meningkatkan proses pemantauan internal dengan menawarkan jalur pelaporan yang aman, privat, dan mudah diakses bagi pejabat atau pihak lain yang menemukan tanda-tanda pelanggaran. Teknik ini memungkinkan deteksi dini dan penyelesaian dugaan *fraud*, sehingga menyelamatkan pemerintahan desa dari kerugian yang lebih besar. Temuan ini konsisten dengan *Fraud Hexagon Theory*, yang menyoroti pentingnya sistem *whistleblower* dalam mencegah dua jenis utama *fraud*: peluang dan rasionalisasi. Individu yang berencana melakukan *fraud* akan ragu jika sistem pelaporan yang transparan diterapkan, karena mengetahui bahwa tindakan mereka akan teridentifikasi melalui sistem pelaporan internal.

Temuan penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Trisnansih (2021), hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa *whistleblowing system* berkontribusi secara signifikan bagi pencegahan tindakan *fraud* di sekolah penerima dana BOS di Kabupaten Lamongan. Senada dengan itu, Harahap et al., (2022) menemukan bahwa sistem pelaporan pelanggaran berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam perusahaan, yang membatasi kemungkinan terjadinya *fraud*. Secara keseluruhan, sistem pelaporan pelanggaran merupakan alat penting dalam mendukung upaya pencegahan *fraud* karena mendorong terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel, mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran, dan membangun budaya organisasi yang berintegritas dan akuntabel dalam pemerintahan desa.

#### 3.2.3 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan temuan penelitian, dedikasi organisasi memiliki dampak yang baik serta memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam upaya pencegahan praktik penyalahgunaan dana desa di wilayah pemerintahan desa Kabupaten Lamongan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemimpin desa yang berkomitmen tinggi terhadap tugas dan kewajibannya cenderung lebih menjaga kejujuran, akuntabilitas, dan loyalitas. Komitmen organisasi sangat penting dalam membentuk perilaku etis dan integritas moral para pejabat, sehingga mereka menjadi lebih waspada dalam mengambil keputusan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran atau penyimpangan. Menurut *Fraud Hexagon Theory*, rendahnya komitmen organisasi dapat memicu rasionalisasi (pembenaran diri), yang merupakan pendorong utama *fraud*. Ketika komitmen organisasi tinggi, individu merasakan kewajiban moral terhadap lembaga, yang mengurangi kecenderungan untuk memaafkan perilaku *fraud*.

Penelitian ini mendukung kesimpulan Badrullhuda et al., (2021) bahwa komitmen dan keyakinan etis individu berdampak pada perilaku antikorupsi dan pencegahan *fraud*. Senada dengan itu, Safitri (2022) menekankan pentingnya komitmen organisasi dalam memotivasi individu untuk mengungkap *fraud* dan mengembangkan budaya integritas di dalam lembaga publik. Dalam praktiknya, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang kuat dari para pemimpin desa Lamongan membantu menumbuhkan budaya kerja yang transparan, bertanggung jawab, dan berintegritas. Oleh karena itu, peningkatan komitmen organisasi merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pemerintahan desa yang bebas dari perilaku curang.

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis keterkaitan antara pengendalian internal, *whistleblowing system*, serta komitmen organisasi terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut berkontribusi memengaruhi pencegahan *fraud*. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa terwujudnya tata kelola desa yang bersih dan akuntabel bukan hanya bergantung pada aspek administratif semata, tetapi juga pada budaya organisasi dan kesadaran moral aparat desa. Pengendalian internal terbukti berkontribusi terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini menegaskan bahwa semakin efektif penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Lebih lanjut, *whistleblowing system* telah menunjukkan kontribusi terhadap pencegahan *fraud*. Ketersediaan mekanisme pelaporan ini menciptakan jalur komunikasi yang aman dan rahasia antara pejabat dan pengawas, sehingga menumbuhkan budaya keterbukaan dan akuntabilitas. Para pejabat menjadi lebih berhati-hati ketika menyadari bahwa setiap kegiatan dapat diawasi dan dilaporkan. Lebih lanjut, komitmen organisasi berkontribusi dalam mengurangi *fraud* dana desa. Komitmen ini menunjukkan kesetiaan dan kejujuran para pejabat terhadap keyakinan dan tujuan organisasi. Pejabat yang berkomitmen tinggi akan menjunjung tinggi tanggung jawab moral, menolak tindakan yang tidak etis, dan bekerja keras untuk menjaga reputasi organisasi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, dimana selama proses pengumpulan data, tidak semua perangkat desa dapat hadir karena kegiatan lapangan maupun kendala administratif, sehingga survei harus dilakukan secara bertahap dan berpotensi memengaruhi konsistensi jawaban responden. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada perangkat desa di Kecamatan Lamongan, sehingga ruang lingkupnya terbatas dan hasilnya belum dapat digeneralisasi ke desa lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Dengan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah studi ke lebih banyak kabupaten atau kota dengan kondisi sosial, ekonomi, dan administratif yang lebih beragam guna menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud* dana desa.

## REFERENCES

- ACFE Global. (2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. Association of Certified Fraud Examiners, Inc., 1– 88. <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>
- Badrullhuda, A., Hadiyati, S. N., & Yusup, J. (2021). Komitmen Profesional Dan Sensitivitas Etis Dalam Intensi Melakukan Whistleblowing. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(4), 522–543. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i4.4524>
- Cahyani, P. S. A. (2023). Pengaruh Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng (Universitas Pendidikan Ganesha). Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Retrieved from <https://repo.undiksha.ac.id/15618/>
- Deasri, N. K. D., & Utama, I. M. K. (2022). Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Kesesuaian Kompensasi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2105–2117. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Dewi, C. A. P., & Sari, R. P. (2022). Implementasi Sistem E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jombang. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, (1), 200–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4608>
- Dewi, F. M., & Trisnaningih, S. (2021). Pengaruh Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Bos dengan Variabel Intervening Komponen Stuktur Pengendalian Internal. *Jurnal MEBIS (Manajemen Dan Bisnis)*, 6(2), 1–12. Retrieved from <https://doi.org/10.33005/mebis.v6i2.252>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Deza, I. R., & Utomo, D. C. (2024). Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa: Peran Pengendalian Internal dan Masyarakat. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22(1), 21–33. Retrieved from <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Eskandar. (2022). Efektivitas Pengendalian terhadap Pelaksanaan Anggaran di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 46.
- Fikiza, A., & Halimatusyadiah. (2025). Pengaruh Elemen Fraud Hexagon Theory dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 510–522. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.5156>
- Fitriana, A. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu dengan Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Dinas di Kabupaten Tegal) (Politeknik Harapan Bersama). Politeknik Harapan Bersama, Tegal. Retrieved from <http://eprints.poltektegal.ac.id/4271/>
- Hamzah, A., & AE, A. G. (2023). Kepala Desa di Lamongan Ditahan karena Dugaan Korupsi dan Salahgunakan Wewenang. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/08/173017078/kepala-desa-di-lamongan-ditahan-karena-dugaan-korupsi-dan-salahgunakan>
- Harahap, D. S. P., Nasrizal, Indrawati, N., & Sandri, S. H. (2022). The Pengaruh Internal Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderator (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 82–91. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3065>
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(4), 972–981. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Intan, L. B. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada BPKAD Kota Palopo (Universitas Muhammadiyah Palopo). Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo. Retrieved from <http://repository.umpalopo.ac.id/1771/>
- Kasmini, K. L. S., & Dewi, N. A. W. T. (2021). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi

- Penganggaran terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng Barat). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 420–430. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=59813>
- Khoerunnisa, L., Nugroho, & Kurniati, F. (2023). Pengaruh Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi pada Aparatur Desa di Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 2(2), 143–154. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>
- Mufidah, & Masnun. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 519–525. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>
- Nurhayati, N. (2022). Komitmen Organisasi, Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(1), 114–136. Retrieved from [www.rakyatjelata.net](http://www.rakyatjelata.net)
- Prabawati, N. W. S., & Rasmini, N. K. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi, Whistleblowing pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(5), 921–936. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Putri, N. K. A. R., & Kisanawati, B. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 22(1), 115–123. <https://doi.org/10.53512/valid.v22i1.488>
- Rahmadani, A. P., Nugroho, G. W., & Martaseli, E. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknolog*, 15(2), 1–4. Retrieved from <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Rahmayanti, A. (2020). *Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi* (Univesitas Negeri Jakarta). Univesitas Negeri Jakarta, Jakarta. Retrieved from [http://repository.unj.ac.id/9978/7/SKRIPSI\\_AULIA\\_RAHMAYANTI\\_8335162167.pdf](http://repository.unj.ac.id/9978/7/SKRIPSI_AULIA_RAHMAYANTI_8335162167.pdf)
- Safitri, D. (2022). The Determinants of Intent to Whistle-blowing: Organizational Commitment, Personal Cost of Reporting, and Legal Protection. *Accounting Analysis Journal*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/aaj.v11i1.54734>
- Sanjani, N. M. W., & Werastuti, D. N. S. (2021). Peran Komitmen Organisasi, Perspektif Budaya Tri Hita Karana, dan Whistleblowing System dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(1), 104–114.
- Sanjaya, N. M. W. S. (2022). Whistleblowing and Organizational Factors to Improve LPD Fraud Prevention Capabilities During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Economia*, 18(1), 28–39. <https://doi.org/10.21831/economia.v18i1.40403>
- Sari, N. I., & Majid, J. (2021). Peran Whistleblower dalam Pengelolaan Dana Desa Upaya Mewujudkan Good Village Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2), 194–217.
- Syafitri, S. S., & Syafidinal. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 2548–7507. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1446>
- Syaputri, J., Sagala, L., & Situmorang, D. R. (2025). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Whistleblowing sebagai Variabel Moderasi pada Desa di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(1), 193–207. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Wawo, A. (2022). Pengaruh Kualitas Audit dan Whistleblowing System terhadap Pendeteksian Fraud. *Seiko : Journal of Management & Business*, 5(2), 681–696. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.2353>
- Wulandari, N. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Yolanda, O., Leoni, & Putri, F. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa. *JJA : Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–6.